

Penilaian Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Rani Velia Salsabilla^{1*}, Iskandar Ali Alam²

^{1*,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia.

Abstrak. Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan mereka. Hal ini penting untuk menciptakan daya saing yang didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan potensi dan karakteristik unik setiap wilayah. Evaluasi kinerja keuangan daerah menjadi penting, terutama dalam konteks prinsip akuntabilitas yang berkualitas tinggi, yang melibatkan penilaian mendalam terhadap pengukuran kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan fokus pada analisis rasio keuangan daerah. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, yakni Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandar Lampung dari tahun 2019 hingga 2021. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung, jika dinilai berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, terkategori dalam tingkat konsultatif. Namun, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan ketidakefektifan dalam pengelolaan sumber pendapatan tersebut. Selain itu, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan tingkat efisiensi yang masih kurang optimal. Rasio Pertumbuhan PAD, Total Pendapatan, dan Belanja Operasi menunjukkan tren negatif, sementara Rasio Pertumbuhan Belanja Modal menunjukkan tren positif.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Kinerja Keuangan; Kemampuan Keuangan.

Abstract. Regional autonomy policies implemented by local governments have a significant impact on their financial management efficiency. It is important to create competitiveness based on principles appropriate to the potential and unique characteristics of each region. Assessing regional financial performance is critical, especially in the context of high-quality accountability principles, including thorough evaluation of regional financial performance measures. This study uses a quantitative descriptive method, focusing on analyzing regional financial ratios. The data used comes from secondary sources, specifically the Bandar Lampung City Budget Achievement Report from 2019 to 2021. The research results show that the regional financial performance of Bandar Lampung City, if evaluated based on the regional financial independence ratio, is ranked at advisory level. However, the original regional income (PAD) efficiency ratio shows inefficiency in managing this source of income. In addition, the regional financial efficiency ratio shows that the level of efficiency has not yet reached the optimal level. PAD, gross income, and operating expenditure growth rates trended negatively, while capital expenditure growth rates trended positively.

Keywords: Locally Generated Revenue; Financial Performance; Financial Capabilities.

* Author. Email: rani.19021107@student.ubl.ac.id^{1*}, iskandar@ubl.ac.id².

Pendahuluan

Era otonomi daerah membawa pemerintahan Indonesia ke dalam fase baru dalam pengelolaan sumber daya sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah memegang peranan sentral sebagai instrumen yang mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Kesuksesan otonomi daerah tercermin dalam pengelolaan keuangan yang efisien, akuntabel, dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga daerah tersebut. Pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel adalah kunci untuk memastikan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, memberikan informasi yang transparan, dan memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 merupakan landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan mereka. SAP memberikan kerangka kerja yang jelas dan standar yang harus diikuti agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dan diandalkan sebagai alat evaluasi kinerja keuangan.

Pengelolaan pemerintahan daerah yang akuntabel tak dapat dilepaskan dari manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah instrumen penting dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD mencakup aspek perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif dan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa kinerja instansi pemerintah harus diukur dalam hal kuantitas dan kualitas keluaran atau hasil kegiatan atau program yang telah atau akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran. Konsep akuntabilitas merupakan

prinsip pertanggungjawaban yang melibatkan proses penganggaran, dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, harus benar-benar dapat dilaporkan dan pertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta masyarakat.

Namun, realitas pengelolaan keuangan daerah tidak selalu mencerminkan tingkat akuntabilitas yang diharapkan. Melalui Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019 hingga 2021, terjadi fluktuasi pendapatan daerah Kota Bandar Lampung. Pendapatan pada tahun 2019 mencapai 78,35% dari total yang diestimasi, kemudian mengalami penurunan menjadi 70,46% pada tahun 2020, dan akhirnya mengalami kenaikan menjadi 75,72% pada tahun 2021. Analisis mendalam terhadap kondisi ini menjadi esensial untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik dan menjelaskan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin memengaruhi fluktuasi pendapatan daerah selama periode yang diamati. Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pemahaman dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berkesinambungan, dengan tujuan akhir untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Tinjauan Literatur

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah parameter yang menggambarkan sejauh mana tujuan keuangan dalam suatu kegiatan telah berhasil dicapai, meliputi pendapatan dan pengeluaran keuangan (Susanto, 2019; Kusuma & Handayani, 2017). Dalam ranah pemerintahan, pengukuran kinerja keuangan menjadi alat penting dalam mengevaluasi pencapaian yang telah dicapai oleh

pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi organisasi (Alpi & Ramadhan, 2018). Hal ini menjadi esensial dalam memastikan bahwa alokasi dana dan penggunaan sumber daya publik berjalan sesuai dengan tujuan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi.

Pengukuran kinerja keuangan ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan pemerintah daerah. Melalui indikator-indikator seperti rasio keuangan, pemerintah dapat mengidentifikasi sejauh mana sumber daya finansial telah digunakan untuk mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja keuangan menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan dan sejauh mana tujuan kebijakan keuangan telah tercapai. Selain itu, evaluasi kinerja keuangan juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Ini membantu lembaga pengawas dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perubahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya keuangan serta upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dengan tujuan menyajikan informasi yang relevan bagi para pengambil keputusan. Informasi yang disajikan melalui akuntansi keuangan daerah memberikan gambaran tentang peristiwa ekonomi yang signifikan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam alokasi sumber daya terbatas, seperti modal, tenaga kerja, tanah, dan bahan baku, untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka (Antika, Murdayanti, & Nasution, 2020; Tarigan & Nurtanzila, 2013; Vidyasari & Suryono, 2021).

Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih komprehensif daripada stewardship (Septa, 2018). Stewardship merujuk pada manajemen aktivitas dengan cara yang ekonomis dan efisien, tanpa keharusan untuk memberikan laporan. Sebaliknya, akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab individu atau pihak yang bertanggung jawab terhadap pihak yang memberikan amanah. Akuntabilitas melibatkan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh individu atau penguasa yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik (Bovens, Schillemans, & Hart, 2008).

Hal ini mengandung arti bahwa individu atau pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas mereka dengan itikad baik dan efisiensi. Akuntabilitas mendorong transparansi dan pertanggungjawaban yang ketat, serta memberikan dorongan bagi pemangku kepentingan utama untuk bertanggung jawab dan memastikan bahwa layanan publik dijalankan dengan baik (Zumofen, 2016). Dengan kata lain, akuntabilitas menciptakan tekanan bagi para pemangku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin penyediaan layanan publik yang efektif.

Analisis Rasio Keuangan pada APBD Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah indikator yang mencerminkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana eksternal, seperti pemerintah pusat dan provinsi. Semakin rendah rasio kemandirian, semakin besar ketergantungan pada sumber dana eksternal, dan sebaliknya. Rumus untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = (\text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Pendapatan Transfer}) \times 100\%$$

Tabel 1 di bawah ini memberikan gambaran pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan mereka. Tabel ini membantu untuk memahami sejauh mana suatu daerah mengandalkan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima

dari transfer dana eksternal. Dengan mengevaluasi rasio ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi sejauh mana daerah tersebut dapat mandiri dalam pengelolaan keuangannya.

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target pendapatan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, rasio ini membantu mengukur sejauh mana daerah berhasil mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = (\text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Penerimaan PAD}) \times 100\%$$

Melalui perhitungan rasio ini, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi sejauh mana pendapatan asli daerah telah berhasil diwujudkan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini membantu dalam pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan daerah serta memastikan bahwa target pendapatan PAD tercapai dengan efektif.

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

% Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah indikator yang memperlihatkan perbandingan antara biaya yang

dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan jumlah pendapatan yang telah diterima. Dalam konteks ini, rasio efisiensi membantu mengukur sejauh mana suatu daerah dapat mencapai pendapatan dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Rumus untuk menghitung Rasio Efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = (\text{Biaya yang dikeluarkan} / \text{Belanja}) \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

% Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
Dibawah 60	Sangat Efisien

Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan memberikan gambaran tentang perkembangan pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = [(P_n - P_o) / P_o] \times 100\%$$

Keterangan :

R : Pertumbuhan (dalam persen)

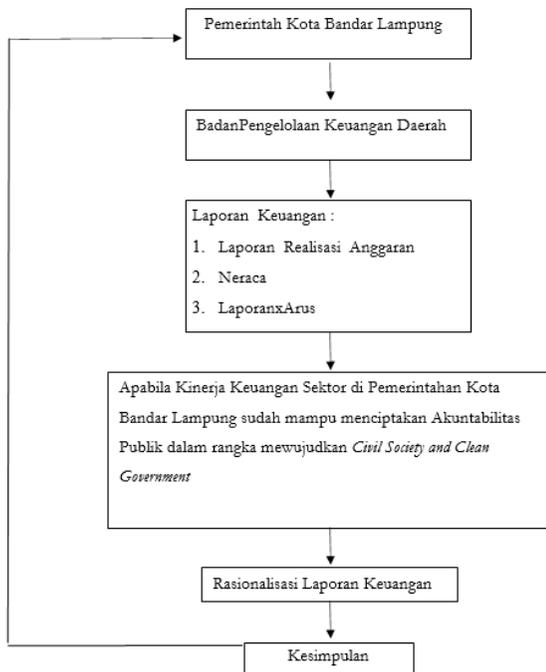
P_n : Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke – n

P_o : Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal sebelumnya

Dalam rumus ini, P_n adalah realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke-n, sementara P_o adalah realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal sebelumnya. Hasil perhitungan rasio ini menghasilkan persentase pertumbuhan yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dan belanja dari satu tahun ke tahun berikutnya. Rasio ini membantu dalam evaluasi kinerja dan perkembangan keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Pemikiran

Terciptanya pemerintahan yang bersih dituntut adanya sistem pengelolaan keuangan terpadu dan ketat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kinerja keuangan daerah merupakan hasil yang telah dicapai atau suatu hasil kerja pada bidang keuangan yang ditetapkan. Tersedianya informasi keuangan yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menghasilkan hal yang dapat disimpulkan berupa rasio keuangan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metodologi Penelitian

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Bandar Lampung dari tahun 2019 hingga 2021.

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui pengumpulan serta studi dokumen, khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung selama periode tersebut. Pada tahap analisis, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode komparatif. Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Analisis Rasio Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis yang terperinci dan mendasar tentang efisiensi, kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan keuangan daerah selama periode yang diselidiki.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Objek Penelitian

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5° 20' Lintang Selatan–5° 30' Lintang Selatan dan 105° 28 Bujur Timur–105° 37' Bujur Timur. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,2 km². Dari luas tersebut, Kota Bandar Lampung terbagi menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan.

Analisis Data

Dalam pembahasan hasil penelitian ini dibahas mengenai bagaimana kinerja keuangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Data yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan Kota Bandar Lampung tersebut adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.

Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Dalam Miliar Rupiah)	Pendapatan Transfer (Dalam Miliar Rupiah)	RKKD%	Pola Hubungan
2019	627,30	1.679,90	40%	Konsultatif
2020	537,54	1.493,84	36%	Konsultatif
2021	564,29	1.462,90	39%	Konsultatif

Berdasarkan kajian pada APBD Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 kemampuan keuangan pada aspek kemandirian sebesar 40% sedangkan sebesar 60% dari bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Pada tahun 2020 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung mengalami penurunan rasio dengan presentase 36%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan realisasi

PAD, sehingga jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung sebesar 39% yang berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun tetap berada pada level rendah, yaitu pola hubungan Konsultatif

Tabel 5. Rasio Efektivitas PAD

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Dalam Miliar Rupiah)	Target Penerimaan PAD (Dalam Miliar Rupiah)	REPAD%	Kriteria
2019	627,30	980,70	64%	Kurang Efektif
2020	537,54	1.293,98	41%	Tidak Efektif
2021	564,29	1.135,60	50%	Tidak Efektif

Dengan hasil presentase diatas Rasio Efektivitas PAD Kota Bandar Lampung digolongkan pada level Kurang Efektif di tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 dan 2021 pada level Tidak Efektif. Hal itu disebabkan karena rata-rata rasio efektifitas berada dibawah 100%. Pemerintahan Kota Bandar Lampung dianggap

belum dapat mengelola realisasi PAD yang telah dianggarkan sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus memaksimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah diperoleh

Tabel 6. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Dalam Miliar Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Dalam Miliar Rupiah)	REKD%	Kriteria
2019	2.189,50	2.294,7	95%	Kurang Efisien
2020	2.127,50	2.145,8	99%	Kurang Efisien
2021	2.018,39	2.127,7	95%	Kurang Efisien

Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2019-2021 yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki presentase dibawah 100%, yang berarti tergolong Kurang Efisien. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa efisien pengelolaan keuangan pemerintah daerah kota Bandar Lampung kurang baik. Artinya pemerintah

daerah dianggap belum menekan jumlah belanja pada daerah secara optimal. Diharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meminimalisir jumlah belanja daerah menyesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh untuk kedepannya.

Tabel 7. Rasio Pertumbuhan

Keterangan	2019	2020	2021	Rata-Rata
PAD	627,3	537,54	564,3	-
Pertumbuhan PAD	11,96%	-14,31%	4,98%	-1,32%
Pendapatan Total	2.294,7	2.145,8	2.127,75	-
Pertumbuhan Pendapatan	6,13%	-6,49%	-0,84%	-0,40%
Belanja Operasi	1.875,8	1.837,3	1.593,1	-
Pertumbuhan Belanja Operasi	6,43%	-2,05%	-13,29%	-2,97%

Belanja Modal	310,73	263,72	400,78	-
Pertumbuhan belanja Modal	-26,91%	-15,13%	51,97%	3,31%

Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD KotaxBandar Lampung pada tahun 2019 sampai dengan 2021 menghasilkan rata-rata sebesar -1,32%. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mempunyai rencana yang baik untuk selalu meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki. Pertumbuhan PAD menjadi lebih baik apabila tidak terlalu mengandalkan bantuan dan pemerintah pusat sehingga lebih mandiri untuk mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi. Hasil dari Pertumbuhan Pendapatan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa total pendapatan di Kota Bandar Lampung menurun. Hal ini diakibatkan karena dampak pandemic Covid-19 yang menyebabkan bertambahnya pengangguran. Sejak diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) aktivitas masyarakat menjadi lebih ketat daripada aturan-aturan sebelumnya.

Perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan yang menghasilkan belanja operasi dengan rata-rata -2,97%. Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan Modal bisa dikatakan buruk, namun proporsi belanja operasi jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja modal. Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung seharusnya bisa mengoptimalkan dana alokasinya untuk belanja operasi sehingga pembangunan di daerahnya bisa lebih maksimal.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2019 hingga 2021 yang diukur dengan menggunakan analisis rasio sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis data menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung secara keseluruhan masih menunjukkan tingkat kinerja yang kurang

memuaskan. Terdapat fluktuasi dalam perhitungan rasio keuangan setiap tahun, dengan beberapa rasio menunjukkan tren positif dan sebagian lainnya menunjukkan tren negatif.

- 2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, seperti pemerintah pusat, masih cukup tinggi, dengan persentase di bawah 50%. Hal ini mengindikasikan ketergantungan yang konsultatif.
- 3) Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kinerja yang cenderung kurang efektif, karena target pendapatan asli daerah belum sepenuhnya tercapai selama tahun 2019-2021.
- 4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah masih dikategorikan sebagai kurang efisien, karena persentase pengeluaran yang dihasilkan selama 3 tahun berturut-turut berada di atas 90% namun di bawah 100%.
- 5) Rasio Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif, dengan rata-rata hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD, Total Pendapatan, dan Belanja Operasi yang negatif secara berturut-turut. Hanya Rasio Pertumbuhan Belanja Modal yang menunjukkan pertumbuhan positif. Ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung masih menghadapi kendala dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, dengan memaksimalkan kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan.
- 2) Strategi perlu diatur untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada sumber dana eksternal, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan retribusi dan pajak, dengan tujuan membangun kemandirian keuangan.
- 3) Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan agar kinerja keuangan daerah dapat menjadi lebih efektif.

- 4) Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana dengan lebih proporsional agar tercipta keseimbangan antara pengeluaran belanja dengan pendapatan daerah.
- 5) Peningkatan alokasi dana untuk belanja operasi, termasuk penyediaan peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan, dapat membantu memenuhi kebutuhan yang memberikan manfaat jangka pendek bagi pegawai dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alpi, M. F., & Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 103-114.
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2), 212-232.
- Bovens, M., Schillemans, T., & Hart, P. T. (2008). Does public accountability work? An assessment tool. *Public administration*, 86(1), 225-242.
- Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(1).
- Septa, P. (2018). *Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten ponorogo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.
- Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2013). Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29-45.
- Vidyasari, F. N. A., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Zumofen, R. (2016). *Public accountability: a summary analysis* (No. 4/2016). IDHEAP.